



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR KERJA EVALUASI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
PERKARA DAN PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN**

**PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM**



2023

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DAFTAR ISI

- 1. Cascading Kinerja Puslitka**
- 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Konsinyering Finalisasi Penyusunan Cascading, Perjanjian Kinerja, Renakin (Dialog Kinerja) Tahun 2018 Serta Tindak Lanjut Rapat Evaluasi Anggaran Tahun 2018**
- 3. Undangan Rapat Lanjutan Pembahasan Cascading Kinerja dan renstra 2020-2024**



CASCADING KINERJA PUSLITKA

CASCADING KINERJA ESELON II

Sekretariat Jenderal

PUSLIKA

(SASARAN PROGRAM 2.6)

Terselenggaranya penanganan perkara
Konstitusi yang bermutu.

(SASARAN 6.1)

Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi

Indikator:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi (skor 80)
2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus (2020:70%,2021:73%,2022:73%, 2023:73%, 2024:50%)
3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya, Maksimal 18 Bulan
4. Persentase Jumlah Perkara PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang diputus (100%)
5. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan UU (100%)

Indikator

Indikator:

1. Persentase penyusunan Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu (2020:75%, 2021:80%, 2022:85%, 2023:90%, 2024:95%)
2. Persentase mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian (2020:50%, 2021:60%, 2022:70%, 2023:80%, 2024:90%)
3. Persentase pemuatan karya ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum ilmiah lainnya. (2020:60%, 2021:60%, 2022:60%, 2023:70%, 2024:70%)
4. Persentase ketersediaan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi (80%)
5. Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (LO) (80%)

CASCADING KINERJA ESELON II

Sekretariat Jenderal

PUSLITKA

(SASARAN 6.2)

Meningkatnya Kualitas Administrasi Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Perpustakaan

Indikator:

1. Persentase penyerapan anggaran PUSLITKA (95%)
2. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja PUSLITKA yang tepat waktu (100%)
3. Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS PUSLITKA yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin) (100%)
4. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material (100%)
5. Persentase PNS PUSLITKA yang memiliki kategori nilai SKP baik (100%)
6. Tingkat Kepatuhan PNS PUSLITKA terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja (100%)
7. Tingkat Kehadiran Pegawai Pusat PUSLITKA (100%)
8. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan (100%)

CASCADING KINERJA ESELON III DAN IV

PUSLITKA

(SASARAN 6.1)

Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi

Indikator:

1. Persentase penyusunan Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu (2020:75%, 2021:80%, 2022:85%, 2023:90%, 2024:95%)
2. Persentase mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian (2020:50%, 2021:60%, 2022:70%, 2023:80%, 2024:90%)
3. Persentase pemuatan karya ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum ilmiah lainnya. (2020:60%, 2021:60%, 2022:60%, 2023:70%, 2024:70%)
4. Persentase ketersediaan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi (80%)
5. Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (LO) (80%)

Bidang Penelitian Dan Pengkajian Perkara

Meningkatnya Kualitas dukungan substantif dalam Penanganan Perkara Konstitusi

Indikator:

1. Persentase Draft Naskah Akademik rancangan peraturan yang direview (70%)
2. Persentase hasil draft naskah akademik yang dikoreksi (70%)
3. Persentase Hasil Kajian Perkara yang Dibahas (90%)
4. Persentase Hasil Telaah Perkara (90%)
5. Persentase Laporan Kesesuaian Konsep Pendapat Hukum. (90%)
6. Jumlah Laporan Hasil Penelitian (12 Laporan)
7. Jumlah artikel jurnal yang terpilih
 - a. Jurnal Konstitusi (40 Artikel)
 - b. Constitutional Review (12 artikel)

Bidang Perpustakaan Dan Sejarah Konstitusi

Meningkatnya Kualitas dukungan substantif dalam Penanganan Perkara Konstitusi

Indikator:

1. Persentase Terpenuhinya Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi
 - a. Terpenuhinya referensi cetak terkait penanganan Perkara (80%)
 - b. Terpenuhinya referensi digital terkait penanganan Perkara (80%)
2. Tersusunnya grand desain yang komprehensif (1 dokumen)
3. Tersedianya konten Pusat Sejarah dan Konstitusi (80%)
4. Terlaksananya kegiatan pemeliharaan Puskon (70%)
5. Jumlah Laporan Kegiatan Pameran Konstitusi (4 Laporan)

Sub Bagian Tu Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Perpustakaan

Meningkatnya Layanan Ketatausahaan Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Perpustakaan

Indikator:

1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pembahasan Naskah Akademik (1 Laporan)
2. Persentase jumlah Artikel yang telah direview atas artikel yang diterima dari penulis (100%)
3. Laporan Layanan dan Kunjungan ke MK dan Pusat Konstitusi (12 Laporan)
4. Jumlah Jurnal Konstitusi yang diterbitkan (4 kali setahun)
5. Jumlah Jurnal Constitutional Review yang diterbitkan (2 kali setahun)
6. Jumlah Laporan Tata Usaha (4 Laporan)

PUSLITKA

(SASARAN 6.1)

Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi

Indikator:

1. Persentase penyusunan Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu (2020:75%, 2021:80%, 2022:85%, 2023:90%, 2024:95%)
2. Persentase mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian (2020:50%, 2021:60%, 2022:70%, 2023:80%, 2024:90%)
3. Persentase pemuatan karya ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum ilmiah lainnya. (2020:60%, 2021:60%, 2022:60%, 2023:70%, 2024:70%)
4. Persentase ketersediaan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi (80%)
5. Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (LO) (80%)

PENELITI

Meningkatnya Kualitas dukungan substantif dalam Penanganan Perkara Konstitusi

Indikator:

1. Persentase Konsep Naskah Akademik yang disusun (70%)
2. Presentase hasil kajian perkara (90%)
3. Persentase Hasil Telaah Perkara yang Telah Ditelaah (90%)
4. Persentase Penyiapan Konsep Pendapat Hukum yang telah disusun (90%)
5. Persentase tersusunnya artikel jurnal yang telah diedit (100%)
6. Jumlah Karya Ilmiah yang termuat dalam Media (Jurnal, Surat Kabar, Buletin, dll) (2 KTI)
7. Tingkat Penguasaan Materi Hukum dan Konstitusi (95%)

(SASARAN 6.2)

Meningkatnya Kualitas Administrasi Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Perpustakaan

Indikator:

1. Persentase penyerapan anggaran PUSLITKA (95%)
2. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja PUSLITKA yang tepat waktu (100%)
3. Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS PUSLITKA yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin) (100%)
4. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material (100%)
5. Persentase PNS PUSLITKA yang memiliki kategori nilai SKP baik (100%)
6. Tingkat Kepatuhan PNS PUSLITKA terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja (100%)
7. Tingkat Kehadiran Pegawai Pusat PUSLITKA (100%)
8. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan (100%)

**GENERIK
SAMA DI
SEMUA ES. II**



**DISKUSI
MASUKAN DAN SARAN**

TERIMA KASIH



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65-1 TAHUN 2018

TENTANG

KEGIATAN KONSINYERING FINALISASI PENYUSUNAN CASCADING, PERJANJIAN KINERJA, RENAKIN (DIALOG KINERJA) TAHUN 2018 SERTA TINDAK LANJUT RAPAT EVALUASI ANGGARAN TAHUN 2018

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Konsinyering Finalisasi Penyusunan Cascading, Perjanjian Kinerja, Renakin (Dialog Kinerja) Tahun 2018 serta Tindak Lanjut Rapat Evaluasi Anggaran Tahun 2018;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tercantum pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Kegiatan Konsinyering Finalisasi Penyusunan Cascading, Perjanjian Kinerja, Renakin (Dialog Kinerja) Tahun 2018 serta Tindak Lanjut Rapat Evaluasi Anggaran Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);

5. Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Dukungan Administrasi dan Keuangan Atas Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KEGIATAN KONSINYERING FINALISASI PENYUSUNAN CASCADING, PERJANJIAN KINERJA, RENAKIN (DIALOG KINERJA) TAHUN 2018 SERTA TINDAK LANJUT RAPAT EVALUASI ANGGARAN TAHUN 2018.**
- KESATU : Menetapkan Kegiatan Konsinyering Finalisasi Penyusunan Cascading, Perjanjian Kinerja, Renakin (Dialog Kinerja) Tahun 2018 serta Tindak Lanjut Rapat Evaluasi Anggaran Tahun 2018, pada tanggal 20 dan 21 September 2018 di The Sahira Hotel-Bogor, Jawa Barat;
- KEDUA : Membentuk Panitia yang bertugas mempersiapkan semua kelengkapan kegiatan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan, Peserta kegiatan Konsinyering Finalisasi Penyusunan Cascading, Perjanjian Kinerja, Renakin (Dialog Kinerja) Tahun 2018 serta Tindak Lanjut Rapat Evaluasi Anggaran Tahun 2018 dan Staf Pendukung, sesuai dengan daftar pada Lampiran I;
- KETIGA : Memberikan hak keuangan kepada Panitia, Peserta dan Staf Pendukung sebagaimana diatur ketentuan yang berlaku dan indeks Lampiran II keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2018 tanggal 5 Desember 2017
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 18 September 2018

SEKRETARIS JENDERAL,


M. GUNTUR HAMZAH

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Jenderal MK
Nomor : 65.1 Tahun 2018
Tanggal : 28 September 2018

**DAFTAR PANITIA, PESERTA, DAN STAF PENDUKUNG
KEGIATAN KONSINYERING FINALISASI PENYUSUNAN CASCADING, PERJANJIAN
KINERJA, RENAKIN (DIALOG KINERJA) TAHUN 2018 SERTA TINDAK LANJUT RAPAT
EVALUASI ANGGARAN TAHUN 2018**

- A. Penanggung Jawab : M. Guntur Hamzah
- B. Ketua : Pawit Haryanto
- C. Wakil Ketua : Makhmudah
- D. Sekretaris : Syarief Hidayatullah Az-Zaky
- E. Seksi Kesekretariatan : Debby Yelviona
- F. Seksi Keuangan, Akomodasi dan Konsumsi : 1. Santi Widiastuti
2. Khurin'in Kurnia Putri
- G. Seksi Acara dan Persidangan : 1. Rimas Kautsar
2. Melati Kusuma Wardani
3. Siska Yuniza
- H. Seksi Perlengkapan, Transportasi, dan Pengamanan/Pengawalan : 1. Windu Budiyanto
2. Aris Wahyu Hajianto
- I. Staf Pendukung (sesuai dengan penugasan/surat tugas)
- J. Peserta:
- | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. Pawit Haryanto | 22. Paiyo | 43. Yuni Sandrawati |
| 2. Tatang Garjito | 23. Imam Margono | 44. Ardiansyah Salim |
| 3. Mulyono | 24. S.H Az Zaky | 45. Bambang Sukmadi |
| 4. Rubiyo | 25. Isti Widayanti | 46. Budi Wijayanto |
| 5. Budi Achmad Djohari | 26. Endrizal | 47. Hanindyo |
| 6. Triyono Edy Budhiarto | 27. Maria Ulfah K. | 48. Nallom Kurniawan |
| 7. Muhidin | 28. Dede Agustina Naibaho | 49. Taufik Gunanda |
| 8. Wiryanto | 29. Andi Hakim | 50. Debby Yelviona |
| 9. Heru Setiawan | 30. Eddy Purwanto | 51. Rimas Kautsar |
| 10. Kurniasih Panti Rahayu | 31. Mastiur Afrilidiany P. | 52. Melati Kusuma W. |
| 11. Teguh Wahyudi | 32. Romi Sundara | 53. Chandra Okantara |
| 12. Ida Ria Tambunan | 33. Nor Rosyid Ardani | 54. Santi Widiastuti |
| 13. Sigit Purnomo | 34. Yohana Citra | 55. Siska Yuniza |
| 14. Sri Handayani | 35. Yossy Adriva | 56. Khurin'in Kurnia Putri |
| 15. Makhmudah | 36. Nanang Subekti | 57. Windu Budiyanto |
| 16. Iman Sudirman | 37. Arshinta Fitridiani | 58. Aris Wahyu Hajianto |
| 17. Elisabeth | 38. Ardli Nuryadi | 59. Amriansyah Maulana |
| 18. AKBP. Nana Suherna | 39. Ina Zuchriyah | 60. Kasiman |
| 19. Mundiri | 40. Johan Yustisianto | 61. Ishak Purnama |
| 20. Mula Pospos | 41. Mohammad Arief | 62. Rudi Kurniawan |
| 21. Fajar Laksono | 42. Jefriyanto | |

K. Narasumber

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I, Kementerian PAN dan RB;
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Kinerja Anggaran, Kementerian PAN dan RB;
5. Kepala Biro/ Pusat/ Inspektur/Panitera Muda I, II dan III Mahkamah Konstitusi.

SEKRETARIS JENDERAL,



M. GUNTUR HAMZAH



Lampiran II : Keputusan Sekretaris Jenderal MK
Nomor : 65-1 Tahun 2018
Tanggal : 10 September 2018

**INDEKS HONOR
BAGI PANITIA, PESERTA DAN STAF PENDUKUNG
KEGIATAN KONSINYERING FINALISASI PENYUSUNAN CASCADING, PERJANJIAN
KINERJA, RENAKIN (DIALOG KINERJA) TAHUN 2018 SERTA TINDAK LANJUT
RAPAT EVALUASI ANGGARAN TAHUN 2018**

NO	JABATAN	INDEKS (Rp)	KETERANGAN
A.	Honor Narasumber		
	Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	1.700.000,-	OJ
	Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan	1.700.000,-	OJ
	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	1.400.000,-	OJ
	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1.000.000,-	OJ
	Pejabat Eselon IV/ yang disetarakan	800.000,-	OJ
B.	Honor Panitia		
	Penanggung Jawab	450.000,-	OK
	Ketua	400.000,-	OK
	Wakil Ketua	350.000,-	OK
	Sekretaris/Anggota	300.000,-	OK
C.	SPD		
	Uang Transport DKI Jakarta ke Kota Bogor (ONE WAY)	300.000,-	Orang/Kali
	Uang Transport Dalam Kabupaten/Kota (PP)	150.000,-	Orang/Kali
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota Jawa Barat	430.000,-	OH
	Uang Harian Kegiatan Rapat Fullboard di Luar Kota Jawa Barat	150.000,-	OH
	Uang Harian Kegiatan Rapat Fullboard di Dalam Kota Jawa Barat	125.000,-	OH
	Uang Harian Kegiatan Rapat Half Day di Luar Kota Jawa Barat	105.000,-	OH

SEKRETARIS JENDERAL,


M. GUNTUR HAMZAH



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1513/PR.04.01/08/2019 05 Agustus 2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Rapat Lanjutan Pembahasan Cascading Kinerja dan Renstra 2020-2024

Kepada
(Daftar Nama Terlampir)
di
Tempat

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti rapat koordinasi yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/5 Agustus 2019
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 11, Gd. Mahkamah Konstitusi
Agenda Pembahasan : Tujuan, sasaran strategis, sasaran program, output program, kegiatan, sasaran program, indikator program, indikator kegiatan (Renstra MK 2020-2024)
Pimpinan Rapat : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Agar pelaksanaan rapat berjalan lancar, tertib dan mengarah pada pencapaian tujuan, peserta diharapkan mempersiapkan bahan rapat serta hadir tepat waktu.

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,

Tatang Garjito

Tembusan:

1. Bapak Sekretaris Jenderal;
2. Bapak Panitera.



Digital Signature-mk2286871866

Lampiran

Nomor : 1513/PR.04.01/08/2019

Tanggal : 05 Agustus 2019

1. M. Guntur Hamzah
2. Muhidin
3. Tatang Garjito
4. Pawit Haryanto
5. Mulyono
6. Kurniasih Panti Rahayu
7. Rubiyo
8. Teguh Wahyudi
9. Wiryanto
10. Heru Setiawan
11. Budi Achmad Djohari
12. Triyono Edy Budhiarto
13. Ida Ria Tambunan
14. Endrizal
15. Isti Widayanti
16. Iman Sudirman
17. Sigit Purnomo
18. Ina Zuchriyah
19. Johan Yustisianto
20. Fajar Laksono
21. Sri Handayani
22. Budi Wijayanto
23. Elisabeth
24. Mundiri
25. Yuni Sandrawati
26. Makhmudah
27. Nor Rosyid Ardani
28. Murry Miranda
29. Nanang Subekti
30. Imam Margono
31. Budi Hari Wibowo
32. Romi Sundara
33. Syarief Hidayatullah Az Zaky
34. Andi Hakim
35. Mastiur Afrilidiany Pasaribu
36. Dewi Hastuti
37. Mutia Fria Darsini
38. R.A. Indah Apriyanti
39. Gunawan
40. Ardli Nuryadi
41. Mochamad Arafah
42. Akbar Anatajaya
43. Arshinta Fitridiyani
44. Nerpi Juita Sinurat
45. Jefriyanto
46. Ardiansyah Salim
47. Melati Kusuma Wardani
48. Debby Yelviona
49. Khurin'in Kurnia Putri
50. Windu Budiyanto
51. Chandra Okantara
52. Santi Widiastuti
53. Siska Yuniza
54. Aris Wahyu Hajianto
55. Dian Dwi Hapsoro
56. Wijang Ardi Rahmadi